

## **“Peluang Emas Pemenuhan HAM Melalui Demokrasi: Analisis Komparatif Rezim Pemerintahan di Filipina”**

Alyaa Hasna Syifa<sup>1</sup>, Aulia Nur Aini<sup>2</sup>, Jessica Nathania<sup>3</sup>

1. Universitas Diponegoro - [syifaalyahasna@gmail.com](mailto:syifaalyahasna@gmail.com)

2. Universitas Diponegoro - [auliaini26@gmail.com](mailto:auliaini26@gmail.com)

3. Universitas Diponegoro - [jessicanathaniaaa24@gmail.com](mailto:jessicanathaniaaa24@gmail.com)

### **Abstrak**

Kepatuhan dan implementasi HAM suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik material maupun non-material, salah satunya adalah demokrasi. Hal ini berlandaskan pada fakta bahwa demokrasi menjadi sarana penampung aspirasi rakyat di suatu negara. Tidak hanya itu, demokrasi juga menjunjung tinggi kebebasan individu. Tulisan ini berargumen bahwa demokrasi menjadi faktor penting dalam pemenuhan, perlindungan, dan implementasi HAM di suatu negara. Melalui studi pustaka, akan dilakukan analisis perbandingan terhadap dua rezim pemerintahan di Filipina, yaitu Ferdinand Marcos dan presiden selanjutnya, Corazon Aquino. Pembahasan tulisan ini akan dimulai dengan pemaparan pandangan umum mengenai demokrasi. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos dan Presiden Corazon Aquino yang akan menjadi fokus studi komparatif dari tulisan ini. Peranan *transnational advocacy network* (TAN) sebagai *non-state actor* dalam keberlangsungan HAM melalui demokrasi di Filipina juga akan dijelaskan. Pembahasan akan ditutup dengan analisis justifikasi pada pemerintahan Presiden Corazon Aquino yang benar menunjukkan bahwa pemerintahan yang demokratis lebih menjamin terpenuhinya HAM di Filipina disertai dengan solusi yang dapat dilakukan untuk menjamin pemenuhan HAM di era pemerintahan Ferdinand Marcos Jr. Hasil analisis tulisan ini menyimpulkan bahwa pemenuhan HAM di suatu negara, termasuk di Filipina, sangat bergantung pada sistem demokrasi yang dibuktikan dengan kelahiran beberapa *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang memperjuangkan HAM di negara tersebut.

**Kata kunci :** Hak asasi manusia, Demokrasi, Filipina, *transnational advocacy network* (TAN), Rezim

## ***Abstract***

*Human rights compliance and implementation are determined by various factors, both material and non - material, including democracy. This statement is based on the fact that democracy stands as a media to channel people's aspirations. Furthermore, democracy also upholds individual liberty. This paper argues that democracy becomes one of the crucial factors in human rights fulfillment, protection, and implementation of a country. Through the method of literature study, a comparative analysis will be made to examine two government regimes in the Philippines, Ferdinand Marcos and Corazon Aquino, respectively. The discussion starts with a general overview of democracy, followed by elaboration of Ferdinand Marcos and Corazon Aquino governance as the main focus of this paper. In addition, the role of Transnational Advocacy Network (TAN) as a non-state actor will be further explained as one of the key factors of sustainability of human rights practice in the Philippines. To end the discussion, a deeper analysis will re-emphasize that democratic governance gives more guarantee to human rights fulfillment in the Philippines with some addition of possible solutions to ensure human rights protection in the regime of Ferdinand Marcos Jr. as the new president of Philippines. The result of this article shows that human rights implementation, especially in the Philippines, is highly dependent on the democracy system itself with the nascence and participation of Transnational Advocacy Networks (TAN) struggle in human rights.*

***Keywords: Human rights, Democracy, Philippines, Transnational Advocacy Network (TAN), Regime***

## PENDAHULUAN

Filipina kembali diliputi kekhawatiran dan ketakutan atas kemenangan Ferdinand Marcos Jr atau yang juga dikenal sebagai 'Bongbong' dalam pemilu tahun 2022. Dalam hasil pemilu tersebut, terhitung pada Senin, 9 Mei 2022 pukul 17:50 waktu setempat, Marcos Jr mendapatkan suara sebanyak 31,00 juta suara (58,74%). Sementara lawan terdekatnya, Leni Robredo, hanya memperoleh 14,78 juta suara (28,01%). Karena kemenangannya yang sudah di depan mata, Marcos Jr pun kemudian memberikan pidato kemenangan di hadapan seluruh pendukungnya.<sup>1</sup> Meskipun demikian, kemenangan Marcos Jr diyakini oleh sebagian masyarakat Filipina sebagai salah satu pertanda kembalinya dinasti politik keluarga Marcos sekaligus bencana yang bisa membawa Filipina pada keterpurukan. Pada saat itu, Filipina yang dipimpin oleh Ferdinand Marcos mengalami krisis oleh sebab pemimpin korup dan diktator yang tidak segan untuk melanggar pelanggaran HAM seperti penjarahan, penyiksaan, penangkapan, dan penghilangan. Selain itu Ferdinand Marcos juga membatasi kebebasan pers, menangkap, dan menghukum berat siapapun yang mengkritik, melawan, atau menentang pemerintah.<sup>2</sup> Dalam tulisan yang berjudul "*Dark Legacy: Human Rights under the Marcos Regime*" dijelaskan bahwa selama masa kepemimpinan Ferdinand Marcos, lebih tepatnya pada masa darurat militer, terdapat banyak pertentangan dan perlawanan dari rakyat Filipina yang menghasilkan 3.257 kasus pembunuhan, 35.000 kasus penyiksaan, dan 70.000 orang yang dipenjara. Tidak hanya itu, sekitar 2.520 orang mengalami mutilasi dan penyiksaan, lalu mayatnya pun dibuang secara serampangan di pinggir jalan. Tindakan tersebut dilakukan di bawah perintah Marcos dengan tujuan untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa mereka akan mengalami hal serupa apabila menentang atau memberikan perlawanan terhadap pemerintah.<sup>3</sup>

Titik balik dari masa kelam ini terjadi pada tahun 1983, yaitu ketika terjadi peristiwa penembakan yang menewaskan senator pro demokrasi, Benigno Aquino. Benigno Aquino dikenal sebagai pihak oposisi yang tak kenal takut dalam melawan kesewenang-wenangan Marcos. Benigno mendapatkan banyak dukungan oleh masyarakat Filipina karena dianggap dapat mengubah Filipina menjadi lebih demokratis. Akan tetapi, harapan masyarakat Filipina musnah dalam sekejap ketika Benigno meninggal di tempat dalam peristiwa penembakan tersebut. Kematian Benigno membangkitkan semangat dan keberanian masyarakat Filipina kala

---

<sup>1</sup> (CNN 2022)

<sup>2</sup> Benedict, Bobby. 2021. "The place of the dead, the time of dictatorship: Nostalgia, sovereignty, and the corpse of Ferdinand Marcos." *EPD: Society and Space* 0 (0): 1-18. <https://doi.org/10.1177%2F02637758211013038>.

<sup>3</sup> McCoy, Alfred. 2001. "'Dark Legacy: Human Rights under the Marcos Regime.'" *Conference: "Memory, Truth Telling and the Pursuit of Justice: A Conference on the Legacies of the Marcos Dictatorship"* (Madison), January, 2001. [https://www.researchgate.net/publication/311984856\\_Dark\\_Legacy\\_Human\\_Rights\\_under\\_the\\_Marcos\\_Regime](https://www.researchgate.net/publication/311984856_Dark_Legacy_Human_Rights_under_the_Marcos_Regime).

mereka mengetahui fakta bahwa dalang dibalik peristiwa tersebut adalah Ferdinand Marcos.<sup>4</sup> Fakta tersebut menyulut semangat masyarakat Filipina untuk berjuang melawan otokrasi Ferdinand Marcos melalui gerakan *'people power'* atau Revolusi EDSA. Berbeda dengan demonstrasi yang seringkali melahirkan kekerasan, demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Filipina justru dilakukan dengan damai dan minim kekerasan.<sup>5</sup> Tepat pada tanggal 25 Februari 1986, revolusi EDSA membuahkan dua hasil. Pertama, Marcos dan keluarganya berhasil diasingkan ke Honolulu (Hawaii) dengan dibantu oleh Presiden Reagan yang pada waktu itu merupakan Presiden Amerika Serikat. Kedua, muncul nama baru yaitu Corazon Aquino, istri dari Benigno Aquino yang kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden Filipina yang ke-11 menggantikan Ferdinand Marcos.<sup>6</sup>

Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di era pemerintahan Marcos membuat Corazon memiliki keinginan untuk menata ulang Filipina. Dengan berbekal dukungan rakyat, Corazon sedikit demi sedikit mengembalikan demokrasi yang sempat hilang. Corazon mulai mendirikan badan legislatif yang kuat, menciptakan peradilan yang independen dan pers yang bebas, serta mengakui peran kunci dari organisasi non-pemerintah<sup>7</sup> seperti mengizinkan beroperasinya beberapa *Transnational Advocacy Network* (TAN), yaitu *Philippine Alliance of Human Rights Advocates*, *Women's Legal and Human Rights Bureau* (WLB), dan *Philippine Human Rights Information Center*.<sup>8</sup> Beberapa cara tersebut dilakukan oleh Corazon untuk menciptakan demokrasi yang partisipatif sebagai upaya pemenuhan dan penegakan HAM di Filipina.

Berdasar pada kondisi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi; manakah di antara sistem demokrasi dan otoriter yang bisa menjamin pemenuhan HAM di Filipina. Dengan menggunakan teori liberalisme republik yang diperoleh melalui studi pustaka, tulisan ini berargumen bahwa sistem demokrasi menjadi faktor penting dalam pemenuhan, perlindungan, dan implementasi HAM di Filipina. Hal ini karena sistem demokrasi akan memberikan kebebasan kepada setiap individu dan kelompok untuk berekspresi. Dengan demokrasi pula,

---

<sup>4</sup> Britannica. n.d. "Benigno Aquino, Jr. | Filipino politician | Britannica." Encyclopedia Britannica. Accessed July 6, 2022. <https://www.britannica.com/biography/Benigno-Aquino-Jr>.

<sup>5</sup> Putzel, James. 1999. "Survival of an imperfect democracy in the Philippines." *Democratization: Routledge Taylor and Francis Group* 6 (1): 198-223. 10.1080/13510349908403603.

<sup>6</sup> Hadi, Kisno. 2019. "Perbandingan Penegakan Demokrasi Di Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos." *Insignia Journal of International Relations* 6:13-29. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1246>.

<sup>7</sup> Off Our Backs: A Women's News Journal. 1986. "Philippines: Corazon Aquino becomes president." *MARCH FOR WOMEN'S LIVES* 16 (4): 12-13. <https://www.jstor.org/stable/25794968>.

<sup>8</sup> Human Rights Careers. n.d. "10 NGOs Advocating for Human Rights in the Philippines." Human Rights Careers. Accessed July 8, 2022. <https://www.humanrightscareers.com/issues/ngos-advocating-for-human-rights-in-the-philippines/>.

organisasi non-pemerintah (NGO) yang menjadi bagian dari *Transnational Advocacy Network* (TAN) akan hadir untuk mempermudah pemenuhan, perlindungan, dan implementasi HAM.

Tulisan ini akan terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama akan menjelaskan sistem demokrasi secara umum dan kaitannya dengan pemenuhan, perlindungan, dan implementasi HAM. Bagian kedua akan menguraikan kondisi Filipina di era kepemimpinan Ferdinand Marcos. Bagian ketiga akan menguraikan kondisi Filipina di era kepemimpinan Corazon Aquino. Bagian ini juga akan menjelaskan bagaimana pemenuhan dan perlindungan HAM mulai kembali ditegakkan di Filipina. Bagian keempat akan menghadirkan analisis perbandingan antara kepemimpinan Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino. Bagian terakhir berisi kesimpulan dan saran yang dapat dilakukan oleh Marcos Jr selaku pemenang pemilu 2022 untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos.

## PEMBAHASAN

### A. Demokrasi

Demokrasi muncul pertama kali pada muncul pada zaman Yunani Kuno. Demokrasi atau “pemerintahan rakyat” digunakan sebagai alat praktik dalam keberlangsungan hidup bernegara. Pada saat itu, Demokrasi hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan rakyat terhadap penguasa atas sikap semena-menanya.<sup>9</sup> Hingga kini, konsep demokrasi tetap eksis dan digunakan oleh beberapa negara dalam menjalankan roda kehidupan negaranya.

“*Dari Rakyat, Untuk Rakyat, dan Oleh Rakyat*”. Inilah hakikat dari “Demokrasi”. Demokrasi merupakan prinsip dalam penyelenggaraan negara yang memberikan jaminan kesetaraan antara pemerintah dan rakyat. Asas “*Dari Rakyat, Untuk Rakyat, dan Oleh Rakyat*” meletakkan paham dimana keseluruhan penyelenggaraan negara berporos pada pemenuhan hak terhadap rakyat itu sendiri.<sup>10</sup> Rakyat memiliki hak penuh untuk turut terlibat dalam penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan, partisipasi politik secara langsung dan tidak langsung, serta banyak hal lainnya. Pun pemerintah berkewajiban dalam pemenuhan hak terhadap rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Demokrasi juga telah memberikan sistem pemerintahan yang mengatur mengenai batas kekuasaan dan kewajiban tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Mungkin beberapa berpikir bahwa kebebasan yang diberikan oleh demokrasi begitu luas, hingga pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan turut memiliki

<sup>9</sup> Hasbach, Wilhelm. “The Essence of Democracy.” *The American Political Science Review* 9, no. 1 (1915): 50–56. <https://doi.org/10.2307/1945761>.

<sup>10</sup> Icolay, John. 1858. *House Divided*. Accessed July 10, 2022. <https://housedivided.dickinson.edu/sites/lincoln/definition-of-democracy-august-1-1858/>.

“hak individu” mereka masing masing sehingga berpotensi menyebabkan sikap semena-mena terhadap kebijakan publik yang dibuat. Tidak, pemerintah “hanya” bisa berdiri dengan persetujuan yang diberikan oleh rakyat melalui perwalian. Pun apabila pemerintah gagal dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan hak terhadap warga negaranya, maka rakyat memiliki kekuatan untuk menurunkan pemerintah dengan pemerintah baru yang mampu melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>11</sup>

Adapun pemahaman demokrasi oleh para Ahli yang menyatakan betapa krusialnya demokrasi dalam keberjalanan sebuah negara. **Pertama**, Aristoteles. Aristoteles berpandangan bahwa demokrasi merupakan kebebasan. Dalam hal ini, Demokrasi hadir untuk menjamin adanya kebebasan sebagai salah satu bentuk konkrit bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kekuasaan dan kesetaraan di dalam negara.<sup>12</sup> **Kedua**, Harris Soche. Demokrasi dalam pandangan Harris merupakan sebuah bentuk pemerintahan rakyat dimana kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat dan rakyat memiliki HAM untuk mempertahankan, memperjuangkan, dan melindungi diri dari adanya segala bentuk penyimpangan yang bisa saja dilakukan oleh badan pemerintah. Pendek kata, demokrasi terikat kuat dengan “kebebasan” dan “pemerintahan rakyat”. Bila ditelaah lebih dalam, pemenuhan, perlindungan, dan implementasi HAM rakyat oleh sebuah negara pun kuat kaitannya dengan demokrasi. Sejalan dengan pemikiran John Locke, John berpendapat bahwa negara diciptakan sebagai sebuah tempat guna menjaga hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia terdiri dari tiga, yaitu hak untuk hidup, **hak untuk bebas**, dan hak untuk memilih.<sup>13</sup> Maka, secara tersirat sebuah negara yang menganut sistem demokrasi berkewajiban untuk menjamin implementasi hak dasar manusia terhadap setiap warga negaranya. Pun dalam pemenuhan HAM setiap warga negaranya, di lain sisi rakyat pun berkewajiban untuk melakukan kewajiban dalam porsinya masing masing agar keberjalanan kehidupan bernegara berjalan dengan baik dalam satu harmonisasi.

Membahas mengenai kebebasan, terdapat salah satu teori dalam ilmu hubungan dimana kebebasan menjadi dasar dari pemikiran pendekatan tersebut, yaitu **Liberalisme**. Liberalisme merupakan teori HI yang berfokus untuk melihat bagaimana realitas hubungan internasional. Akar teori ini pun tidak terlepas dari filsafat politik dimana kebebasan individu dan persamaan hak merupakan nilai utama dalam penyelenggaraan sebuah negara. Liberalisme kerap dikaitkan dengan pemahaman dimana setiap negara bebas untuk melakukan tindakan, baik dalam hal

---

<sup>11</sup> Rosyidin, Muhammad. 2020. *“Teori Hubungan Internasional; Dari Perspektif Klasik Sampai Non Barat*. PT RajaGrafindo Persada: Depok.

<sup>12</sup> Halsall, Paull. 1998. "Ancient History Sourcebook, Aristotle: from The Politics." *Ancient History Sourcebook*. Accessed 07 10, 2022. <https://sourcebooks.fordham.edu/ancient/aristotle-politics1.asp>

<sup>13</sup> Rosyidin, Muhammad. 2020. *“Teori Hubungan Internasional; Dari Perspektif Klasik Sampai Non Barat*. PT RajaGrafindo Persada: Depok

kerjasama, melakukan perjanjian, dan tindakan lainnya yang menjadi wewenang sebuah negara dalam lingkup internasional. Kaum liberalis mengedepankan bentuk kolaboratif berupa kerjasama ketimbang melakukan konflik. Bagi kaum liberalis, konflik merupakan sebuah hal yang buruk sehingga dapat mengganggu kesempatan kerjasama yang seharusnya dapat dilakukan. Pun hal ini juga didukung dengan asumsi liberalisme dimana setiap manusia dianugerahi kemampuan untuk membedakan yang mana hal baik dan buruk.<sup>14</sup> Ditambah lagi, liberalisme memandang bahwa kerja sama dapat menghasilkan *win win solution* dimana semua pihak mampu mendapatkan kepuasan dan mencapai kepentingannya masing-masing melalui kerja sama tadi. Adapun tujuh nilai dasar dalam liberalisme yaitu rasionalitas, individualitas, kemajuan, **kebebasan**, *sociability*, kepentingan umum, dan **kekuasaan yang terbatas dan bertanggung jawab**.<sup>15</sup> Dengan adanya kebebasan dalam nilai liberalisme, maka demokrasi dan liberalisme memiliki paham yang sama dalam hal penyelenggaraan negara. Terdapat kaitan pula diantara keduanya dimana negara yang menganut sistem liberalisme dianggap sebagai “negara demokrasi”.

Lebih lanjut, aktor dalam teori liberalisme menurut kaum liberalis bukanlah sebuah negara, melainkan individu dan kelompok. Ibarat negara hanya merupakan sebuah kendaraan dan individu atau kelompoklah yang menjadi pengemudi.<sup>16</sup> Apapun yang terjadi dan kebijakan apapun yang ada dalam sebuah negara dibuat oleh individu dan kelompok tadi yang mungkin tersebar melalui perwakilan, lembaga, ataupun kelompok masyarakat. Tentunya bila dipahami secara seksama, hal ini berarti penyelenggaraan suatu negara bergantung pada individu dan kelompok yang ada didalamnya. Mari berfokus pada individu, sebuah negara dipimpin oleh seorang presiden. Presiden termasuk sebagai seorang individu yang diumpamakan sebagai pengemudi negara. Maka, bagaimana gaya kepemimpinan, cara memimpin, pandangan terkait rakyat, dan lainnya memengaruhi presiden itu sendiri dalam memegang roda keberjalanan penyelenggaraan sebuah negara. Pun tanpa pengemudi, sebuah negara tidak akan bisa berjalan sehingga kehadiran dan esensi presiden sebagai individu dalam hal ini merupakan aspek yang sangat krusial. Oleh karena itu, konsep liberalisme, khususnya **Liberalisme Republikan** akan menjadi teori yang mendasari perbandingan analisis dari kedua rezim di Filipina yang akan dijelaskan lebih lanjut setelah bagian ini.

Memahami terlebih dahulu apa itu liberalisme republikan, liberalisme republikan merupakan aliran liberalisme yang berfokus pada isu demokrasi. Aliran liberalisme ini berpandangan bahwa demokrasi dapat menghadirkan perdamaian. Perdamaian pun bisa hadir dengan banyak cara, salah satunya dengan pemenuhan dan penegakan HAM bagi setiap warga negaranya. Dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*



dijaminnya implementasi HAM maka secara otomatis perdamaian pun akan muncul dengan sendirinya. Aliran ini juga memandang bahwa perdamaian dunia akan tercipta manakala semua negara mengadopsi nilai-nilai demokrasi (liberal).<sup>17</sup> Liberalisme Republikan tidak mengatakan bahwa perang tidak akan pernah sama sekali terjadi. Perang akan tetap ada. Namun, perang yang terjadi ditujukan untuk terus menghidupkan demokrasi dan menjaga hak asasi manusia serta nilai-nilai kebebasan.<sup>18</sup> Pun prinsip demokrasi dan korelasinya terhadap HAM juga dapat dianalisis melalui Liberalisme Republikan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aliran ini menyatakan bahwa dalam *negara-negara demokrasi liberal lebih damai daripada negara lain*.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan demokrasi menawarkan berbagai opsi dan nilai tertentu yang baik dan tepat untuk digunakan dalam penyelenggaraan suatu negara. Untuk ukuran lingkup internasional, negara negara pun dapat dinilai potensi perdamaannya menurut Liberalisme Republikan. Terlebih apabila aliran ini digunakan untuk menilai keberjalanan ezim dalam sebuah negara yang dijadikan sebagai penentu penyelenggaraan demokrasi di sebuah negara.

## **B. Ferdinand Marcos : Biografi, Gaya Kepemimpinan, dan Pelanggaran HAM**

Ferdinand Edralin Marcos merupakan seorang pengacara dan politikus Filipina yang lahir pada 11 September 1917 dan wafat pada 28 September 1989 di Hawaii. Ia menjabat sebagai Presiden Filipina dengan masa jabatan 20 tahun, yaitu dari 1966 sampai 1986. Sebelum terpilih menjadi presiden, Marcos berperan sebagai asisten dari Presiden Filipina pertama, Manuel Roxas. Kemudian, Ia memulai karirnya dengan menjadi anggota dewan perwakilan Filipina di tahun 1949. Sepuluh tahun kemudian, eksistensi Marcos semakin meningkat dengan terpilihnya Ia sebagai Senat. Tepat sebelum menjabat sebagai presiden, yaitu pada 1963 - 1965, Ia menjabat sebagai presiden Senat. Di tahun 1965, Marcos berusaha mencalonkan diri sebagai calon Presiden dari partai liberal yang didirikan oleh Roxas, namun usahanya gagal. Kegagalan itu membuatnya berpindah haluan ke partai nasionalis dimana Ia diterima sebagai calon presiden mewakili partai tersebut. Akhirnya, Ia terpilih sebagai Presiden ke-10 Filipina pada 30 Desember 1965. Di tahun 1969, Ia terpilih kembali untuk periode kedua, yang kemudian membuatnya sebagai Presiden Filipina pertama yang menjabat hingga dua periode. Pada saat Marcos naik ke kursi kepresidenan, Filipina dianggap sebagai salah satu negara dunia ketiga terbaik di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi kawasan Asia - Pasifik. Sebagai gambaran, pada tahun 1950 - 1965, pertumbuhan ekonomi Filipina melebihi seluruh kawasan Asia Tenggara, Jepang, Korea Selatan<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> McGerr, Michael E. "The Meaning of Liberal Republicanism: The Case of Ohio." *Civil War History* 28, no. 4 (1982): 307-323. doi:10.1353/cwh.1982.0016.

<sup>20</sup> University of California Press. 1986. "The Rise and Fall of Ferdinand Marcos." *Asian Survey* 26 (November): 1138. <https://doi.org/10.2307/2644313>.



Di periode pertama kepemimpinan Marcos, Ia berfokus untuk mengembangkan berbagai sektor yang ada di Filipina, mulai dari pendidikan sampai agrikultur. Namun, usaha perbaikan yang Marcos lakukan diiringi dengan hiruk pikuk yang berasal dari demonstrasi dan aktivitas gerilya. Periode kedua kepemimpinan Marcos tidak membuat Filipina bertransformasi ke arah yang lebih baik. Di periode kedua ini, konflik dan kekerasan di antara masyarakat terus meningkat. Kondisi dan keamanan domestik menjadi terganggu dengan adanya beberapa peristiwa pengeboman di kota Manila. Instabilitas domestik tersebut membuat kepemimpinan Marcos menjadi terkenal lantaran bersifat otoriter dan diliputi oleh berbagai macam pelanggaran HAM dengan diimplementasikannya darurat militer (*martial law*) pada tanggal 21 September 1972. Marcos melakukan hal tersebut dengan dalih untuk menyelamatkan negaranya dan merupakan bentuk respons atas klaim merebaknya paham komunisme yang dianggap sebagai penyebab dari krisis di Filipina. Penerapan darurat militer ini menjadi titik awal dari serangkaian tindakan pelanggaran HAM dan pembatasan demokrasi di Filipina. Lebih lanjut lagi, di tahun 1973, Marcos mulai mempraktikkan diktatorismenya dengan membuat konstitusi baru sebagai usaha untuk menumpas komunisme - yang menurut Marcos - sudah menembus berbagai sektor kehidupan Masyarakat. Dengan diterapkan *martial law*, Marcos menggunakan kekuatan militer untuk kepentingan pribadinya dalam usaha mencapai kepentingan pribadinya yang pada akhirnya berujung pada serangkaian kegiatan yang menyimpang dari prinsip HAM dan demokrasi. Pasukan militer pada saat itu digunakan untuk memberantas kegiatan - kegiatan yang dianggap dapat menggulingkan pemerintahan Marcos, seperti menangkap dan memenjarakan lawan politiknya (contoh : Benigno Aquino, Jr.), pemberlakuan jam malam, sensor, serta melarang segala kegiatan demonstrasi, yang turut didukung oleh pasukan militer Filipina yang setia terhadap sang diktator<sup>21</sup>. Kekejaman dan pelanggaran HAM di era Marcos dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu :

### **1. Penculikan dan Penghilangan Paksa Warga Sipil**

Kegiatan ini dilakukan oleh angkatan militer yang seharusnya bertugas untuk melindungi rakyat Filipina. Adapun satuan militer yang terlibat dalam peristiwa keji ini adalah Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), Grup Intelijen dan Keamanan Metrocom (MISG), dan Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Filipina (ISAFP). Dalam tulisan milik Alfred W. McCoy yang berjudul "*Dark Legacy: Human Rights under the Marcos Regime*" dipaparkan bahwa terdapat 3.257 kasus pembunuhan, 35.000 kasus penyiksaan, dan 70.000 orang yang dipenjara karena berusaha menentangnya<sup>22</sup>. Adapun para korban

---

<sup>21</sup> ISEAS - Yusof Ishak Institute. 2018. "Claiming History: Memoirs of the Struggle against Ferdinand Marcos's Martial Law Regime in the Philippines." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 3, no. 22 (July): 459. <https://www.jstor.org/stable/26538540?read-now=1&seq=3>.

<sup>22</sup> McCoy, Alfred W. 2016. "Dark Legacy : Human Rights Under the Marcos Regime." In *Memories, Truth Telling, and The Pursuit of Justice : A Conference on the Legacies of the Marcos Dictatorship*, 131. N.p.: Research Gate.

ditangkap secara paksa dari kediamannya tanpa surat perintah apapun. Selama pemerintahan Marcos, tercatat ada 2.668 insiden penangkapan, 398 penghilangan paksa, 70.000 pemenjaraan, dan 34.000 penyiksaan yang didominasi oleh lawan politik Marcos, jurnalis, pemuka agama, dan aktivis.

## **2. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Pembunuhan**

Lemahnya demokrasi dan perlindungan HAM di era Marcos juga menempatkan perempuan di posisi yang rentan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Human Rights Violations Victims' Memorial Commission Republic of the Philippines, sebanyak 238 wanita menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan dan penculikan, bahkan beberapa diantaranya sampai merengas nyawa<sup>23</sup>. Korban perempuan pertama diketahui bernama Lilia Hilao, dimana pada April 1973, wanita berusia 23 tahun itu ditangkap, disiksa, dan diperkosa oleh para tentara di depan saudara perempuannya yang masih dibawah umur. Ia pun merengas nyawa dengan kondisi mengenaskan, dipenuhi luka, baik luka bakar, memar, maupun laras senapan.

## **3. Genosida**

Tindakan keji Marcos tidak berhenti pada orang - orang yang menentanginya saja, melainkan merambah pula pada kelompok etnis lain. Tercatat ada 14 peristiwa pembantaian dengan 134 korban jiwa pada rentang waktu 1981 - 1982, walaupun darurat militer telah diberhentikan. Salah satu etnis yang menjadi sasaran genosida Marcos adalah etnis Moro, yang didominasi oleh umat Muslim. Etnis ini merupakan salah satu komunitas adat yang bermukim di wilayah Mindanao. Pembantaian keji ini tidak lagi dan tidak bukan melibatkan para pasukan penjaga keamanan yang terdiri dari Polisi, Angkatan Militer, dan Ilaga (kelompok teroris yang diakui Marcos dengan ranah kejahatan pada kanibalisme dan perampasan tanah)<sup>24</sup>. Pembunuhan terhadap etnis Moro ini bahkan telah dilakukan sebelum darurat militer diberlakukan, dimana kurang lebih 100.000 orang Moro merengas nyawa pada akhir insiden ini.

Pada Januari 1981, Marcos menghapuskan penerapan darurat militer. Namun, kepemimpinan otoritarianisme terus berlangsung. Walaupun Marcos mencetak sejarah kelam lewat pemberlakuan darurat militer, ia terpilih kembali sebagai presiden untuk periode berikutnya. Kepemimpinan Marcos di periode ini diliputi dengan segudang masalah, mulai dari serangkaian pemerintah yang korup, ekonomi yang stagnan, semakin besarnya ketimpangan antar kelas sosial, serta merebaknya gerakan gerilya dan pemberontakan. Kondisi tersebut diperparah

---

<sup>23</sup> "List of Victims and Recognized Motu Proprio." n.d. Human Rights Violations Victims' Memorial Commission. Accessed July 10, 2022. <https://hrvmmemcom.gov.ph/list-of-victims-recognized-motu-proprio/>.

<sup>24</sup> Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2013. 2013. "The liberation movements in Mindanao :root causes and prospects for peace." *ISTAC Thesis*. <http://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/2405>.

dengan adanya utang luar negeri sebanyak 25 miliar dollar AS yang kemudian menciptakan krisis ekonomi keuangan. Selain itu, Marcos juga masih tidak memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.<sup>25</sup> Oleh karena itu, rakyat Filipina pada masa itu mengalami kondisi yang buruk karena ketiadaan demokrasi dengan pemimpin yang otoriter dan kejam. Di tahun 1983, kondisi kesehatan Marcos mulai memburuk, namun hal tersebut tidak mengurungkan niatnya untuk mencalonkan diri kembali di pemilu berikutnya, melawan Corazon Aquino. Pemilu tersebut lagi - lagi dimenangkan oleh Marcos, namun ternyata ada indikasi kecurangan yang dilakukannya. Pada akhirnya, Marcos meninggalkan Filipina pada 25 Februari 1986 untuk diasingkan ke Hawaii, dimana Ia menghabiskan sisa hidupnya di sana sampai menutup usia.

### C. Era Pemerintahan Corazon Aquino

#### 1. Kepemimpinan Corazon Aquino dan Reformasi Demokrasi

Maria Corazon Sumulong Cojuangco atau yang lebih dikenal sebagai Corazon Cory Aquino merupakan presiden perempuan pertama di Filipina. Perempuan kelahiran 25 Januari 1933 tersebut lahir dari keluarga politisi kaya raya. Ayahnya yang bernama Jose Cojuangco y Chichio Sr merupakan seorang politisi ulung dan pengusaha sukses di Filipina. Sementara ibunya, Demetria, merupakan anak dari keluarga Sumulong yang memiliki peran penting di Filipina pada masanya. Pada tahun 1953, Corazon kembali ke Filipina untuk sekolah Hukum setelah sebelumnya lulus dengan gelar Bahasa Perancis dan Matematika di College St Vincent, Amerika Serikat. Di situlah, Corazon bertemu dengan Benigno Aquino dan kemudian menikah pada tahun 1954. Setelah menikah dengan Benigno, Corazon terus mendukung setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh suaminya tersebut, termasuk menjadi oposisi bagi pemerintahan Ferdinand Marcos<sup>26</sup>. Benigno Aquino dikenal sebagai salah satu pihak oposisi yang tak kenal takut dalam memberikan perlawanan bagi Presiden Ferdinand Marcos. Ia terus bersuara lantang dalam menyuarkan berbagai pelanggaran HAM, korupsi, dan penyelewengan lain yang dilakukan oleh Marcos. Oleh sebab itu, ketika Marcos memberlakukan Hukum Darurat Militer pada 1972, Benigno diasingkan ke Amerika Serikat selama tujuh tahun.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> McCoy, Alfred. 2001. "Dark Legacy: Human Rights under the Marcos Regime." *Conference: "Memory, Truth Telling and the Pursuit of Justice: A Conference on the Legacies of the Marcos Dictatorship"* (Madison), January, 2001. [https://www.researchgate.net/publication/311984856\\_Dark\\_Legacy\\_Human\\_Rights\\_under\\_the\\_Marcos\\_Regime](https://www.researchgate.net/publication/311984856_Dark_Legacy_Human_Rights_under_the_Marcos_Regime).

<sup>26</sup> Off Our Backs: A Women's News Journal. 1986. "Philippines: Corazon Aquino becomes president." *MARCH FOR WOMEN'S LIVES* 16 (4): 12-13. <https://www.jstor.org/stable/25794968>.

<sup>27</sup> Kompas.com. 2018. "Biografi Tokoh Dunia: Corazon Aquino, Menumbangkan Diktator Filipina Halaman all - Kompas.com." Kompas Internasional. <https://internasional.kompas.com/read/2018/08/01/14441381/biografi-tokoh-dunia-corazon-aquino-menumbangkan-diktator-filipina?page=all>.

Titik balik terjadi di Filipina kala negara itu diliputi oleh berbagai pelanggaran HAM di tahun 1983. Pada tanggal 21 Agustus 1983, Benigno kembali ke Filipina tanpa ditemani oleh keluarganya. Ketika sampai di bandara, secara tiba-tiba Benigno ditembak mati oleh seseorang dari jarak jauh. Kematian Benigno membuat warga Filipina kecewa dan sedih oleh sebab mereka kehilangan seseorang yang mereka harapkan bisa membawa perubahan. Kemarahan warga Filipina semakin menjadi kala mereka mengetahui fakta bahwa dalang dibalik peristiwa tersebut adalah Ferdinand Marcos.<sup>28</sup> Fakta tersebut menyulut semangat masyarakat Filipina untuk berjuang melawan otokrasi Ferdinand Marcos melalui gerakan *'people power'* atau Revolusi EDSA yang dipimpin oleh Corazon Aquino. Di tengah perlawanan tersebut, muncul beberapa tekanan internasional yang mengharuskan Filipina untuk menggelar pemilu presiden pada 1985. Pada pemilu tersebut, nama Corazon Aquino muncul sebagai oposisi dari Ferdinand Marcos dengan satu juta suara dukungan dari rakyat. Akhirnya pemilu presiden pun dilaksanakan dan nama Corazon berada di bawah Marcos dengan selisih yang sangat tipis. Setelah diselidiki oleh rakyat, ternyata terjadi kecurangan dalam pemilu tersebut. Marcos beserta kroninya melakukan pemalsuan suara dan menghukum siapa saja yang memilih Corazon. Mengetahui fakta tersebut, rakyat semakin murka dan meminta Marcos untuk turun saat itu juga. Kekuasaan Marcos kian melemah tatkala kelompok militer dan Menteri Pertahanan yang semula mendukung dirinya justru membelot untuk mendukung Corazon.<sup>29</sup> Sebagai hasil akhirnya, tepat pada tanggal 25 Februari 1986, revolusi EDSA berhasil. Keberhasilan itu ditandai dengan pelantikan secara resmi Corazon Aquino sebagai Presiden Filipina ke-11. Di waktu yang sama, Marcos dan keluarganya diasingkan ke Honolulu (Hawaii) oleh warga Filipina dengan bantuan Presiden Reagan yang waktu itu merupakan Presiden AS.<sup>30</sup> Dengan demikian, Filipina tidak lagi berada dalam belenggu pemimpin otoriter yang banyak melanggengkan penyelewengan HAM. Di bawah Corazon Aquino, kehidupan demokrasi secara perlahan mulai hadir yang dibarengi dengan pengimplementasian, pemenuhan, dan penegakan HAM.

## 2. Kemunculan TAN Sebagai Upaya Memperjuangkan Demokrasi dan HAM

Tahun 1986 menjadi awal bagi kembalinya kran demokrasi di Filipina. Dengan terpilihnya Corazon Aquino sebagai presiden, terjadi transisi otokrasi menjadi demokrasi yang disambut dengan suka cita oleh rakyat Filipina. Corazon sedikit demi sedikit mengembalikan

---

<sup>28</sup> Britannica. n.d. "Benigno Aquino, Jr. | Filipino politician | Britannica." Encyclopedia Britannica. Accessed July 6, 2022. <https://www.britannica.com/biography/Benigno-Aquino-Jr.>

<sup>29</sup> Putzel, James. 1999. "Survival of an imperfect democracy in the Philippines." *Democratization: Routledge Taylor and Francis Group* 6 (1): 198-223. 10.1080/13510349908403603.

<sup>30</sup> Hadi, Kisno. 2019. "Perbandingan Penegakan Demokrasi Di Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos." *Insignia Journal of International Relations* 6:13-29. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1246>.

demokrasi yang sempat hilang di era kepemimpinan Marcos. Corazon berusaha untuk menciptakan demokrasi yang partisipatif dengan cara mendirikan badan legislatif yang kuat, menciptakan peradilan yang independen dan pers yang bebas, dan mengakui peran kunci dari organisasi non-pemerintah<sup>31</sup> seperti mengizinkan beroperasinya *Transnational Advocacy Network* (TAN) di Filipina. Beberapa contoh TAN yang hadir di Filipina yaitu *Philippine Alliance of Human Rights Advocates*, *Women's Legal and Human Rights Bureau* (WLB), dan *Philippine Human Rights Information Center*.<sup>32</sup> Seperti namanya, beberapa TAN tersebut memiliki fokus utama di bidang HAM. Sehingga di era kepemimpinan Corazon, HAM secara perlahan mulai ditegakkan dan dijamin oleh negara.

Dengan bantuan organisasi *Philippine Alliance of Human Rights Advocates* dan *Philippine Human Rights Information Center*, Corazon berhasil mengembalikan lembaga-lembaga demokrasi yang sebelumnya telah dilumpuhkan oleh Marcos. Tujuannya adalah untuk memperkuat demokrasi dengan cara mencegah dan memberikan perlawanan terhadap dinasti politik keluarga yang berkuasa di Filipina. Selain itu, mereka juga bekerja sama untuk mengungkap beberapa kasus pembunuhan terhadap jurnalis, aktivis politik, pemerhati lingkungan, dan pendeta yang sempat disembunyikan oleh Marcos.<sup>33</sup> Aktivitas yang dilakukan oleh *Philippine Alliance of Human Rights Advocates* dan *Philippine Human Rights Information Center* juga membawa kemajuan lain seperti penghapusan Undang-Undang yang bersifat represif, adanya adaptasi terhadap Konstitusi Filipina tahun 1987, peningkatan standar hidup bagi rakyat Filipina, serta adanya keselarasan tujuan koordinasi antara tentara militer dengan aparat sipil pemerintahan.<sup>34</sup>

Organisasi *Women's Legal and Human Rights Bureau* (WLB) juga memiliki peran dalam upaya penegakan HAM Filipina, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan perempuan. Hal ini terbukti dengan dibebaskannya beberapa jurnalis dan tahanan politik setelah sebelumnya ditangkap oleh orang-orang dari pemerintahan Marcos. Mila Aguilar merupakan seorang penyair, guru, dan jurnalis yang dibebaskan oleh Corazon sejak masuk penjara pada tahun 1984 karena usahanya mengungkap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Marcos.

---

<sup>31</sup> Off Our Backs: A Women's News Journal. 1986. "Philippines: Corazon Aquino becomes president." *MARCH FOR WOMEN'S LIVES* 16 (4): 12-13. <https://www.jstor.org/stable/25794968>.

<sup>32</sup> Human Rights Careers. n.d. "10 NGOs Advocating for Human Rights in the Philippines." Human Rights Careers. Accessed July 8, 2022. <https://www.humanrightscareers.com/issues/ngos-advocating-for-human-rights-in-the-philippines/>.

<sup>33</sup> Youngblood, Robert L. 1987. "The Corazon Aquino "Miracle" and the Philippine Churches." *Asian Survey* 7 (12): 1240-1255. <http://www.jstor.org/stable/2644632>.

<sup>34</sup> Tempo.co. 2022. "Profil Corazon Aquino Presiden Filipina, Lawan Tangguh Rezim Ferdinand Marcos." Dunia Tempo.co. <https://dunia.tempo.co/read/1564718/profil-corazon-aquino-presiden-filipina-lawan-tangguh-rezim-ferdinand-marcos>.

Pembebasan Mila Aguilar ini kemudian diikuti dengan pembebasan perempuan lain dari penjara oleh Corazon, termasuk para pemimpin komunis. Selain itu, Corazon juga mengoptimalkan peran organisasi pergerakan perempuan yang telah lebih dulu ada. GABRIELA (*General Assembly Binding Women for Reform, Integrity, Equality Leadership and Action*) merupakan salah satu organisasi yang namanya diambil dari nama Gabriela Silang, seorang pemimpin pemberontakan pada abad ke-19. GABRIELA lahir pada tahun 1984 dengan fokus utama melawan ketertindasan yang selama ini dialami oleh perempuan Filipina. Di ranah politik, GABRIELA kerap memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan untuk mendapatkan tempat dalam pemerintahan. Akan tetapi, ketika Marcos berkuasa, GABRIELA mengalami banyak hambatan dalam memperjuangkan hak perempuan. Ketika Marcos tumbang dan digantikan oleh Corazon, GABRIELA kembali mendapatkan tempat di Filipina dan bisa dengan bebas melaksanakan agendanya.<sup>35</sup> Atas usahanya dalam mengembalikan marwah demokrasi dan penegakan HAM inilah Corazon Aquino mendapat penghargaan sebagai 'Woman of the Year' oleh Majalah TIME pada tahun 1986.<sup>36</sup>

#### D. Analisis Komparatif Implementasi HAM di era Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino dari perspektif demokrasi

Pada bagian ini akan digunakan teori **Liberalisme Republikan** sebagai alat analisis terkait implementasi HAM di kedua rezim dalam berbagai aspek terkait. Mulai dari gaya kepemimpinan, kebebasan pers, TAN & Aktivistis HAM, Penegakan dan Perlindungan HAM, dan jumlah pelanggaran HAM.

- **Gaya kepemimpinan**

Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino memiliki gaya kepemimpinan yang jauh berbeda. Mulai dari Ferdinand Marcos, beliau dikenal sebagai pemimpin yang kerap tidak hirau terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan dalam caranya memimpin, penyimpangan HAM terjadi pada rakyatnya sendiri akibat kediktatoran yang ia miliki. Beberapa contoh kebijakan yang begitu kontroversial dan justru menyebabkan sengsara pada rakyat adalah *platform* ekonomi liberal yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang begitu signifikan.<sup>37</sup> Pun dengan kebijakan *martial law*. Kebijakan Darurat Militer yang dicetuskan oleh Presiden Ferdinand merupakan kebijakan yang begitu memilukan. Tanpa memikirkan rakyatnya sendiri, kebijakan ini perlahan mematikan rakyat Filipina. Puluhan ribu warga sipil ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, dan ribuan lainnya

---

<sup>35</sup> Off Our Backs: A Women's News Journal. 1986. "Philippines: Corazon Aquino becomes president." *MARCH FOR WOMEN'S LIVES* 16 (4): 12-13. <https://www.jstor.org/stable/25794968>.

<sup>36</sup> Biography. 2014. "Corazon Aquino - Education, Death & Achievements - Biography." bio. Biography.com. <https://www.biography.com/political-figure/corazon-aquino>.

<sup>37</sup> CNN. 2022. "Who is 'Bongbong' Marcos Jr and why are some Filipinos nervous about his family's return?". <https://www.cnn.com/2022/05/11/asia/marcos-philippines-president-explainer-intl-hnk/index.html>



disiksa, dihilangkan secara paksa, dan dibunuh. Bahkan tercatat oleh Amnesty Internasional, terdapat lebih dari 50.000 warga sipil seperti pekerja gereja, pembela hak asasi manusia, pengacara bantuan hukum, pemimpin buruh dan jurnalis yang dihilangkan secara paksa, dibunuh, dan disiksa dalam kurun waktu 1972 hingga 1981.<sup>38</sup> Hal ini pun membuat Ferdinand Marcos dikenal sebagai **Diktator Filipina**. Sesuai dengan apa yang dipahami dalam Liberalisme Republikan bahwa sistem otoriter di sebuah negara memungkinkan keputusan dalam hal ini kebijakan, hanya digenggam oleh satu orang pemimpin kuat dan benar, hal ini dilakukan oleh Marcos dengan kediktatorannya. Sistem otoriter pun berpotensi untuk menimbulkan kekacauan dan keraguan masyarakat sipil terhadap pemimpinnya sendiri yang berimbas pada penyimpangan HAM masyarakat sipil. Tentunya, gaya kepemimpinan Marcos ini kurang efektif untuk menciptakan negara dengan perdamaian atas pemenuhan HAM warga negara. Berbeda dengan Marcos, Aquino merupakan gambaran pemimpin yang membuka ruang selebar lebarnya untuk demokrasi dapat melebur dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup> Aquino mengedepankan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Filipina. Dengan adanya ruang bagi demokrasi untuk menciptakan pemenuhan HAM bagi masyarakat sipil Filipina, maka perdamaian di Filipina berangsur-angsur dapat tercipta. Inilah yang menjadi prinsip dari seorang Aquino. Presiden Aquino pun berusaha untuk menjadi **pejuang demokrasi** di Filipina dan berusaha untuk meminimalisir penyimpangan HAM yang terjadi dengan mulai terbuka pada masyarakat. Pun juga Aquino mengedepankan *non-violent action* terkait penyelesaian konflik yang ada selama beliau memimpin Filipina.<sup>40</sup>

- **Kebebasan Pers**

Dapat dilihat dengan jelas pada rezim Ferdinand Marcos, masyarakat Filipina tidak memiliki esensi hidup sesungguhnya sebagai “rakyat”. Kebebasan dikekang, aspirasi masyarakat tak tersampaikan, hak rakyat tidak terpenuhi. Pun media tidak bisa bebas untuk memberikan informasi terkait fakta dan apa yang sedang terjadi di Filipina kala itu. Bahkan, Presiden Marcos juga membubarkan Kongres Filipina dan menutup seluruh media. Tidak hanya itu, pada tragedi *martial law* yang menyebabkan ribuan warga sipil, termasuk wartawan mengalami penyimpangan HAM dengan adanya kecaman, dihilangkan secara paksa, dan ditahan.<sup>41</sup> Kebebasan pers benar benar tidak merdeka kala

---

<sup>38</sup> Amnesty Internasional. 2022. “Five Things to Know About Martial Law In the Phillipines”.  
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/five-things-to-know-about-martial-law-in-the-philippines/>

<sup>39</sup> CNN. 2005. “Then & Now: Corazon Aquino“ <http://www.cnn.com/2005/US/09/19/cnn25.aquino.tan/>

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Amnesty Internasional. 2022. “Five Things to Know About Martial Law In the Phillipines”.  
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/five-things-to-know-about-martial-law-in-the-philippines/>



itu. Berbanding terbalik dengan Ferdinand Marcos, kebebasan pers di era Corazon Aquino mulai berangsur-angsur membaik. Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan penyampaian pendapat baik oleh media ataupun masyarakat sipil. Walaupun tidak langsung begitu sejahtera, demokrasi di Filipina membuka kesempatan untuk menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kontrol, dan pengawasan terhadap pemerintah.<sup>42</sup>

- **TAN & Aktivistis HAM**

Dengan naiknya Presiden Aquino sebagai pemimpin Filipina kala itu, terbuka kesempatan kebebasan bagi masyarakat sipil untuk mendapatkan hak yang seharusnya. Seperti hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, hak berserikat, dan hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Hal ini pun ditandai dengan mulai munculnya *Transnasional Advocacy Network* sebagai salah satu upaya pengawasan terhadap pemerintah, pun sebagai badan untuk membantu pembuatan kebijakan publik di Filipina. Contohnya, dapat dilihat pada gerakan massal pada tahun 1986 oleh masyarakat Filipina atas kasus terbunuhnya Benigno Aquino Jr dan bentuk protes atas sikap otoriter Presiden Ferdinand Marcos Jr dan korupsi yang telah membabi buta. Gerakan “*people power*” ini juga turut didukung oleh beberapa organisasi di Filipina, seperti Organisasi GABRIELA (*General Assembly Binding Women for Reform, Integrity, Equality Leadership and Action*). Pun dengan adanya *people power* beserta dukungan dari organisasi yang ada cukup menunjukkan bahwa perlahan transisi masyarakat Filipina dari pimpinan yang tidak hirau menuju pimpinan yang hirau kepada rakyatnya sendiri mulai terlihat. Begitu juga dengan aktivis HAM lain yang memperjuangkan HAM dan kebebasan memiliki ruang untuk beraspirasi di era Aquino. Bila dibandingkan dengan era Ferdinand Marcos, tentu, gerakan seperti TAN dan juga adanya aktivis HAM pasti menjadi sebuah ancaman. Dimana kehadiran TAN dan aktivis HAM dapat mengganggu keluasaan Ferdinand Marcos sebagai pemimpin yang diktator. Membicarakan mengenai kehadiran TAN dan aktivis HAM di era Ferdinand Marcos rasanya sama seperti berepektasi belaka. Bahkan, kebebasan pers pun tidak merdeka, bagaimana pula dengan hadirnya TAN dan aktivitas HAM?

- **Penegakan dan Perlindungan HAM**

Berdasarkan pemaparan di bagian kedua, terlihat dengan jelas betapa kejamnya perbuatan Marcos dalam melakukan pelanggaran HAM lewat penetapan darurat militer. Walaupun di era kepemimpinan Marcos Filipina telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional, seperti : *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) dan *Convention on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD), serangkaian pelanggaran HAM yang melibatkan kekerasan dan diskriminasi terus terjadi,

---

<sup>42</sup> CNN. 2005. “Then & Now: Corazon Aquino” <http://www.cnn.com/2005/US/09/19/cnn25.aquino.tan/>

contohnya : pembantaian Etnis Moro yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari gaya kepemimpinan Marcos yang diktator sehingga rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan keluh kesahnya. Sedangkan di Era Aquino, semakin banyak perjanjian HAM internasional yang diratifikasi. Di awal kepemimpinan Aquino, tepatnya pada 23 Oktober 1986, Filipina meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang di dalamnya mencakup hak - hak paling mendasar yang bersifat *non-derogable*, salah satunya adalah hak untuk hidup. Hal ini merupakan pertanda bahwa rezim Aquino berusaha memperbaiki kesalahan pemimpin sebelumnya yang sangat mengesampingkan pengakuan dan perlindungan HAM. Lebih lanjut lagi, di tahun yang sama, Filipina juga meratifikasi Convention against Torture, and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. Di tahun 1987, Komisi HAM Filipina (PCHR) dibentuk untuk menginvestigasi kasus - kasus pelanggaran HAM serta mengencangkan edukasi HAM bagi penegak hukum dan anggota militer yang pada periode pemerintahan sebelumnya identik dengan pelaku pelanggaran HAM. Dalam pidatonya di World Conference on Human Rights di Vienna pada tahun 1993, Aquino menyatakan bahwa sebagai pemimpin, Ia sadar bahwa penegakkan dan perlindungan HAM merupakan prioritas utama pemerintah<sup>43</sup>.

- **Jumlah pelanggaran HAM**

Implementasi darurat militer yang dilakukan oleh Marcos sejak tahun 1972 - 1986 menjadi pintu gerbang dari 11.103 tindakan pelanggaran HAM<sup>44</sup>. 2,326 di antaranya merupakan korban pembunuhan dan penghilangan paksa, 238 diantaranya merupakan korban pemerkosaan dan penculikan, 217 diantaranya merupakan korban berbagai macam penyiksaan (mutilasi, kekerasan seksual, yang melibatkan anak - anak). Jumlah orang yang ditahan tanpa sebab mencapai 699 korban. Pada masa jabatan Aquinos, walaupun tidak terjadi perubahan yang signifikan, angka dari beberapa kategori kekerasan ini mulai menurun. Jumlah korban penghilangan paksa tercatat sejumlah 816, sedangkan pembunuhan mencapai angka 731<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> "Her Works." n.d. Cory Aquino - Her Works. Accessed July 11, 2022. <http://www.coryaquino.ph/index.php/works/article/10b66b7c-f2e6-11df-b3cf-001617d76479>.

<sup>44</sup> "List of Victims and Recognized Motu Proprio." n.d. Human Rights Violations Victims' Memorial Commission. Accessed July 10, 2022. <https://hrvmemcom.gov.ph/list-of-victims-recognized-motu-proprio/>.

<sup>45</sup> Kessler, Richard J. 1989. *Rebellion and Repression in the Philippines*. N.p.: Yale University Press. 27 <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1xp3s8c>.

## PENUTUP

Negara merupakan tempat untuk menjaga hak-hak dasar warga negaranya, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memilih. Pun dengan demokrasi yang memberikan jaminan pemenuhan hak dasar warga negaranya dengan sistem “pemerintahan rakyat”. Demokrasi yang erat dengan kebebasan pun memiliki paham yang sama dengan liberalisme, khususnya liberalisme republikan. Liberalisme republikan merupakan pendekatan dalam hubungan internasional yang memandang bahwa “demokrasi dapat mendukung perdamaian”. Salah satu cara menciptakan perdamaian tersebut adalah dengan menjamin penegakan dan perlindungan HAM setiap warga negara. Urgensi penerapan demokrasi terhadap penegakan dan perlindungan HAM dapat dilihat pada era pemerintahan Ferdinand Marcos. Saat pemberlakuan darurat militer dilakukan, demokrasi sangat dibatasi, yang pada akhirnya menimbulkan serangkaian pelanggaran HAM di era tersebut, mulai dari penghilangan paksa, kekerasan seksual, sampai genosida. Oleh karena itu, minimnya demokrasi menghambat usaha perlindungan HAM. Terdapat suatu titik balik di Filipina kala Ferdinand Marcos ditumbangkan oleh rakyat melalui revolusi EDSA dan digantikan oleh Corazon Aquino. Di bawah pemerintahan Corazon, Filipina kembali menjadi negara demokratis yang memiliki komitmen terhadap pemenuhan dan penegakan HAM. Pemenuhan dan penegakan HAM ini termanifestasi dalam beberapa cara, salah satunya mengakui peran kunci dari *Transnational Advocacy Network* (TAN), yaitu *Philippine Alliance of Human Rights Advocates*, *Women’s Legal and Human Rights Bureau* (WLB), dan *Philippine Human Rights Information Center*. Hadinya TAN tersebut memberikan pengaruh bagi kembalinya demokrasi Filipina. Dengan demikian, kembalinya demokrasi di Filipina menandakan bahwa demokrasi menjadi faktor penting dalam pemenuhan, perlindungan, dan implementasi HAM. Apa yang telah dilakukan Corazon dalam usahanya mengembalikan kehidupan demokrasi merupakan suatu langkah yang sepatutnya dipertahankan. Terlebih, dengan terpilihnya Ferdinand Marcos Jr. sebagai presiden Filipina tahun 2022 yang dikhawatirkan dapat memicu kembalinya pemerintahan Marcos Sr. yang otoriter. Oleh karena itu, penting bagi Marcos Jr. untuk belajar dari kegagalan pemerintahan ayahnya sambil meneruskan semangat perjuangan Aquino dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang menjamin pemenuhan HAM di Filipina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. 2011. "Progress, Stagnation, Regression? The State of Human Rights in the Philippines under Aquino." Accessed June 16, 2022. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/asa350022011en.pdf>
- Amnesty Internasional. 2022. "Five Things to Know About Martial Law In the Phillipines". Accessed July 10, 2022. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/five-things-to-know-about-martial-law-in-the-philippines/>
- BARBADOVA, Zlatko JAKOVLEV, Mimoza SERAFIMOVA and Cane KOTESKI. n.d. "THE ROLE OF AMNESTY INTERNATIONAL IN PROTECTING." (University "Goce Delchev"). Accessed June 16, 2022. <https://eprints.ugd.edu.mk/8002/1/THE%20ROLE%20OF%20AMNESTY%20INTERNATIONAL%20IN%20PROTECTING%20OF%20HUMAN%20RIGHTS.pdf>.
- Benedict, Bobby. 2021. "The place of the dead, the time of dictatorship: Nostalgia, sovereignty, and the corpse of Ferdinand Marcos." *EPD: Society and Space* 0 (0): 1-18. <https://doi.org/10.1177%2F02637758211013038>
- Biography. 2014. "Corazon Aquino - Education, Death & Achievements - Biography." bio. Biography.com. <https://www.biography.com/political-figure/corazon-aquino>.
- Britannica. n.d. "Benigno Aquino, Jr. | Filipino politician | Britannica." Encyclopedia Britannica. Accessed July 6, 2022. <https://www.britannica.com/biography/Benigno-Aquino-Jr>.
- CNN. 2005. "Then & Now: Corazon Aquino". Accessed July 9 2022. <http://www.cnn.com/2005/US/09/19/cnn25.aquino.tan/>
- CNN. 2022. "Dictator's son on cusp of winning a landslide in Philippines elections." CNN. <https://edition.cnn.com/2022/05/09/asia/philippines-election-results-marcos-robredo-intl-hnk/index.html>.
- CNN. 2022. "Who is 'Bongbong' Marcos Jr and why are some Filipinos nervous about his family's return?". Accessed July 9 2022. <https://www.cnn.com/2022/05/11/asia/marcos-philippines-president-explainer-intl-hnk/index.html>
- Hadi, Kisno. 2019. "Perbandingan Penegakan Demokrasidi Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos." *Insignia Journal of International Relations* 6:13-29. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1246>.
- Halsall, Paull. 1998. "Ancient History Sourcebook, Aristotle: from The Politics." *Ancient History Sourcebook*. Accessed 07 10, 2022. <https://sourcebooks.fordham.edu/ancient/aristotle-politics1.asp>

- Hasbach, Wilhelm. "The Essence of Democracy." *The American Political Science Review* 9, no. 1 (1915): 50–56. <https://doi.org/10.2307/1945761>.
- "Her Works." n.d. Cory Aquino - Her Works. Accessed July 11, 2022. <http://www.coryaquino.ph/index.php/works/article/10b66b7c-f2e6-11df-b3cf-001617d76479>.
- Human Right Careers. n.d. "10 NGOs Advocating for Human Rights in the Philippines." Accessed June 16, 2022. <https://www.humanrightscareers.com/issues/ngos-advocating-for-human-rights-in-the-philippines/#:~:text=Free%20Legal%20Assistance%20Group%20>.
- Icolay, John. 1858. *House Divided*. Accessed July 10, 2022. <https://housedivided.dickinson.edu/sites/lincoln/definition-of-democracy-august-1-1858/>.
- ISEAS - Yusof Ishak Institute. 2018. "Claiming History: Memoirs of the Struggle against Ferdinand Marcos's Martial Law Regime in the Philippines." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 3, no. 22 (July): 459. <https://www.jstor.org/stable/26538540?read-now=1&seq=3>.
- Kessler, Richard J. 1989. *Rebellion and Repression in the Philippines*. N.p.: Yale University Press. 27 <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1xp3s8c>.
- Kompas.com. 2018. "Biografi Tokoh Dunia: Corazon Aquino, Menumbangkan Diktator Filipina Halaman all - Kompas.com." Kompas Internasional. <https://internasional.kompas.com/read/2018/08/01/14441381/biografi-tokoh-dunia-corazon-aquino-menumbangkan-diktator-filipina?page=all>.
- Landman, Todd. 2017. "Democracy and Human Rights: Concept, Measures, and Relationship." *Politics and Government Journal*. Accessed June 15, 2022. [https://www.researchgate.net/publication/323236846\\_Democracy\\_and\\_Human\\_Rights\\_Concepts\\_Measures\\_and\\_Relationships](https://www.researchgate.net/publication/323236846_Democracy_and_Human_Rights_Concepts_Measures_and_Relationships).
- "List of Victims and Recognized Motu Proprio." n.d. Human Rights Violations Victims' Memorial Commission. Accessed July 10, 2022. <https://hrvmmemcom.gov.ph/list-of-victims-recognized-motu-proprio/>.
- McCoy, Alfred W. 2016. "Dark Legacy : Human Rights Under the Marcos Regime." In *Memories, Truth Telling, and The Pursuit of Justice : A Conference on the Legacies of the Marcos Dictatorship*, 131. N.p.: Research Gate.
- McGerr, Michael E. "The Meaning of Liberal Republicanism: The Case of Ohio." *Civil War History* 28, no. 4 (1982): 307-323. doi:10.1353/cwh.1982.0016.

- Off Our Backs: A Women's News Journal. 1986. "Philippines: Corazon Aquino becomes president." *MARCH FOR WOMEN'S LIVES* 16 (4): 12-13. <https://www.jstor.org/stable/25794968>.
- Open Democracy. 2009. "Cory Aquino and democracy in the Philippines." openDemocracy. <https://www.opendemocracy.net/en/cory-aquino-and-democracy-in-the-philippines/>.
- Putzel, James. 1999. "Survival of an imperfect democracy in the Philippines." *Democratization: Routledge Taylor and Francis Group* 6 (1): 198-223. 10.1080/13510349908403603.
- Rosyidin, Muhammad. 2020. *"Teori Hubungan Internasional; Dari Perspektif Klasik Sampai Non Barat*. PT RajaGrafindo Persada: Depok.
- Tempo.co. 2022. "Profil Corazon Aquino Presiden Filipina, Lawan Tangguh Rezim Ferdinand Marcos." *Dunia* Tempo.co. <https://dunia.tempo.co/read/1564718/profil-corazon-aquino-presiden-filipina-lawan-tangguh-rezim-ferdinand-marcos>.
- Youngblood, Robert L. 1987. "The Corazon Aquino "Miracle" and the Philippine Churches." *Asian Survey* 7 (12): 1240-1255. <http://www.jstor.org/stable/2644632>.